

Judul : Pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi, mungkinkah?
Tanggal : Senin, 21 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pendidikan Gratis Dari SD Sampai Perguruan Tinggi, Mungkinkah?

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga universitas negeri harus gratis. Pernyataan Prabowo itu mendapat respons beragam. Di satu sisi, mendapat dukungan. Di sisi lain, pernyataan Prabowo dikhawatirkan hanya menjadi gimik komunikasi semata. Sebelumnya, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutan pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (19/9/2026) malam. Dia mengatakan, akan segera menggelar rapat terbatas

untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya tersebut. "Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan rapat (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis," katanya. Prabowo kemudian merinci jenjang pendidikan negeri yang menurutnya harus digratiskan. "Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegasnya. Prabowo juga menyinggung sumber pendanaan untuk mewujudkan kebijakan pendidikan gratis tersebut. Menurut Prabowo, salah satu sumber pendanaan dapat

berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri. "Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri," tegas Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik wacana Prabowo memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Menurut dia, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan terbaik.

"Skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang," ujar Lalu Hadrian kepada *Rakyat Merdeka* melalui pesan WhatsApp, Minggu (20/9/2026). Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim berpandangan, wacana pendidikan gratis hingga kuliah merupakan langkah yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas. Namun, dia mengaku khawatir hal tersebut hanya menjadi

wacana semata. "Kami merasa ragu dan khawatir, jangan sampai pernyataan Presiden ini kemudian terkesan hanya sebatas gimik komunikasi di depan forum atau pertemuan publik," ungkap Satriawan Salim kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (20/9/2026). Dia menambahkan, semangat optimistik yang disampaikan Presiden tersebut menjadi bertolak belakang, ketika diperhadapkan dengan realitas APBN serta kebijakan politik anggaran Pemerintah. Satriawan menuturkan, pada poster Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, total anggaran

pendidikan direncanakan sebesar Rp 820,9 triliun dan secara formal memang mencukupi syarat 20 persen. "Namun, sebesar Rp240 triliun dari anggaran pendidikan tersebut justru dialokasikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. Jadi, sisanya Rp 580,9 triliun dan itu sekitar 14,2 persen saja dari anggaran pendidikan," tutur Satriawan. Untuk mengetahui pandangan Lalu Hadrian Irfani dan Satriawan Salim mengenai wacana Presiden menggratiskan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, berikut wawancaranya.

SATRIWAN SALIM

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan & Guru (P2G)

Kami Khawatir Hanya Gimik Komunikasi Saja



“Antara pidato Presiden dengan realitas politik anggaran yang ada, justru tampak sangat kontras, alias terjadi paradoks.”

Bagaimana Anda melihat wacana dan pernyataan Presiden akan menggratiskan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi?
Ya, tentu pada dasarnya kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi niat baik dari Bapak Presiden untuk mewujudkan pendidikan gratis yang dilayati penuh oleh negara, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain, P2G justru merasa ragu dan khawatir.

Apakah yang membuat Anda ragu?
Kami merasa ragu dan khawatir, jangan sampai pernyataan Presiden ini kemudian terkesan hanya sebatas gimik komunikasi di depan forum atau pertemuan publik. Semangat optimistik yang sering disampaikan tersebut menjadi bertolak belakang ketika kita diperhadapkan dengan realitas APBN, kondisi ekonomi, serta kebijakan politik anggaran Pemerintah. Antara pidato Presiden dengan realitas politik anggaran yang ada justru tampak sangat kontras, alias terjadi paradoks.

Di mana letak paradoksnya?
Jelas terlihat pada poster RAPBN

2027. Total anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 820,9 triliun dari total APBN sekitar Rp 4.090 triliun. Angka Rp 820,9 triliun itu memang secara formal mencukupi syarat 20 persen. Namun, sebesar Rp 240 triliun dari anggaran pendidikan tersebut justru dialokasikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Aturan terbarunya bagaimana?
Mahkamah Konstitusi melalui putusan terbaru telah memutuskan bahwa anggaran MBG wajib-dikecualikan dari anggaran pendidikan. P2G sendiri merupakan salah satu pemohon uji materi yang memenangkan gugatan tersebut di MK. Banyak pihak yang lupa bahwa MK memutuskan jika RAPBN 2027 sedang direncanakan, anggaran MBG memang masih dapat menggunakan alokasi anggaran pendidikan, tetapi ada syarat ketatnya, yaitu sepanjang tidak mengurangi anggaran minimum 20 persen untuk pendidikan murni.

Perhitungannya seperti apa?
Dalam hitungan kami, jika anggaran pendidikan Rp 820,9 triliun dipotong Rp 240 triliun untuk MBG, maka sisa

nya hanya tinggal Rp 580,9 triliun. Angka Rp 580,9 triliun ini dari total APBN Rp 4.090 triliun nilainya setara dengan sekitar 14,2 persen saja. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, serta melanggar Putusan MK Nomor 040 Tahun 2026.

Lalu, apa saran dari Anda agar wacana ini bisa dilakukan?

Jika Presiden ingin menggratiskan pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi, maka harus bisa terlaksana secara konsisten dan realistik, jika anggaran pendidikan betul-betul hanya diperuntukkan bagi komponen utama pendidikan.

Apa komponen utamanya?
Meningkatkan kesejahteraan guru honoror, mengangkat guru menjadi PNS, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, madrasah, dan kampus. Bukan untuk program MBG. Jadi, menurut saya, niat baik Presiden bertentangan dengan kebijakan politik anggarannya sendiri. ■ **REM**

LALU HADRIAN IRFANI

Wakil Ketua Komisi X DPR

Pendidikan Gratis Sangat Mungkin Diwujudkan



“Pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak Indonesia mendapatkan pendidikan layak dan berkualitas.”

Apakah tanggapan Anda dengan wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi?

Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri.

Apakah ada catatan Anda dengan wacana ini?
Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Bagaimana dengan kondisi APBN jika akses pendidikan gratisnya diperluas hingga tingkat perguruan tinggi?

Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang.

Apakah yang harus dipersiapkan?
Jangan sampai kebijakan menggratiskan biaya kuliah justru kemudian

mengurangi kualitas layanan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, riset, maupun operasional perguruan tinggi. Karena itu, perlu ada perhitungan yang komprehensif mengenai berapa kebutuhan anggarannya.

Konkretnya seperti apa?

Ya, bagaimana mekanisme pembiayaan PTN setelah UKT tidak lagi dibebankan kepada mahasiswa, serta bagaimana memastikan perguruan tinggi tetap memiliki ruang yang cukup untuk berkembang.

Tetapi, anggarannya cukup atau tidak?

Menurut saya, belum bisa langsung disimpulkan sebelum Pemerintah melakukan simulasi secara menyeluruh.

Kondisi anggaran pendidikan saat ini seperti apa?

Untuk RAPBN 2027, alokasi pendidikan direncanakan sekitar Rp 820,9 triliun. Namun, anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sehingga tidak seluruhnya bisa langsung dialokasikan untuk membiayai pendidikan gratis

di PTN. Bahkan, dalam pembahasan anggaran 2027, saya melihat alokasi Kemendiknas/teknik masih membutuhkan penguatan untuk berbagai program pendidikan tinggi, beasiswa, peningkatan mutu tridarma, dan lain-lain. Jadi, prinsipnya kami mendukung arah kebijakannya. Namun, implementasinya harus terukur dan berbasis kemampuan fiskal negara.

Apakah saran dari Anda kepada Pemerintah?

Jangan hanya gratis dalam pengertian tidak membayar UKT, tetapi negara juga harus memastikan biaya operasional PTN, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin. Kami berharap dalam ratas nanti Pemerintah bisa menyampaikan desain kebijakannya secara lebih konkret, termasuk simulasi kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaannya.

Artinya Komisi X DPR siap mendukung kebijakan tersebut, ya?

Kami tentu siap mengawal agar kebijakan ini benar-benar memperluas akses pendidikan sekaligus menjaga kualitas pendidikan tinggi kita. ■ **REM**